

BAB 2

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Auditing

2.1.1 Pengertian Umum Auditing

Menurut *American Accounting Association* (AAA), auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Arens, Elder, & Beasley (2006), auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang independen dan berkompeten.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang mendasari definisi auditing. Poin pertama adalah informasi dan kriteria yang ditetapkan dimana dalam pelaksanaan audit harus terdapat informasi yang dapat diuji dan suatu kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Poin kedua adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit dimana bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan oleh karena itu dibutuhkan bukti audit yang memadai untuk dapat mencapai tujuan audit. Poin ketiga adalah seseorang yang kompeten dan independen dimana auditor harus memiliki kualifikasi dalam memahami kriteria yang ditetapkan serta harus kompeten dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang perlu diuji untuk mencapai kesimpulan audit yang tepat serta harus mampu mempertahankan mental independen agar mampu bersikap objektif dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti. Poin keempat adalah pelaporan dimana

merupakan suatu bentuk komunikasi atas kesimpulan auditor mengenai tingkat kesesuaian antara suatu informasi dengan kriteria yang ditetapkan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam kaitannya dengan akuntansi, sebagian besar auditing memang terkait informasi akuntansi dan banyak auditor yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, namun terdapat perbedaan antara akuntansi dan auditing. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi dengan cara yang logis untuk menyediakan informasi keuangan guna pengambilan keputusan. Ketika mengaudit data akuntansi, fokus auditor adalah menentukan apakah informasi yang tercatat telah mencerminkan kejadian ekonomi yang sebenarnya terjadi selama periode akuntansi yang bersangkutan.

2.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens, Elder, & Beasley (2006), terdapat 3 jenis audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik, antara lain:

1. Audit laporan keuangan

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk menentukan apakah terdapat *error* atau *misstatement* lainnya yang bersifat material dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit yang berisi opini audit atas laporan keuangan.

2. Audit operasional

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan *review* tidak terbatas hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagian-bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional merupakan suatu

hal yang bersifat subjektif sehingga audit operasional cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari audit operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efektivitas dan efisiensi operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional perusahaan.

3. Audit kepatuhan

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan/otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.

2.1.3 Standar Auditing

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus dapat memenuhi kaidah-kaidah dalam standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Menurut Pernyataan Standar Auditing No. 1 (SA Seksi 150), standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu "prosedur" berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan "standar" berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Secara umum terdapat 10 standar auditing dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang terbagi atas Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor;

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor;
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya;
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit;

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya;
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor;
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.4 Opini Audit

Dalam audit laporan keuangan, *output* yang dihasilkan adalah laporan audit yang berisi pendapat (opini) auditor atas laporan keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar Auditing No. 29 (SA Seksi 508), terdapat beberapa tipe pendapat auditor, yaitu:

a. **Pendapat wajar tanpa pengecualian**

Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini diberikan apabila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. **Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan**

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan tersebut meliputi:

- 1) Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain;
- 2) Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
- 3) Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai;

- 4) Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya;
- 5) Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif;
- 6) Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) namun tidak disajikan atau tidak *di-review*;
- 7) Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan-raguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut;
- 8) Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;

Selain itu, dalam beberapa keadaan, auditor mungkin perlu memberi penekanan atas suatu hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini diberikan oleh auditor ketika:

- 1) Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat;

- 2) Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

d. Pendapat tidak wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

2.1.5 Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan Aturan Etika Kompartemen Akuntan, pengertian kantor akuntan publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Pemberian jasa profesional kepada klien oleh KAP dapat berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan *review*, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

2.1.6 Proses Audit

Proses audit adalah suatu metodologi yang tersusun dengan baik dalam mengorganisasikan suatu audit untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkumpul telah memadai dan kompeten serta semua tujuan audit yang tepat telah terspesifikasi dan terpenuhi. Menurut Arens, Elder, & Beasley (2006), proses audit meliputi 4 tahap, antara lain:

1) Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Dalam menentukan pendekatan audit yang akan digunakan, auditor harus mempertimbangkan 2 hal, yaitu bukti yang memadai dan kompeten harus terkumpul untuk memenuhi tanggung jawab profesional auditor, serta biaya pengumpulan bukti tersebut harus seminimal mungkin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, auditor harus membuat perencanaan yang menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada tingkat biaya yang wajar.

Dalam perencanaan dan perancangan pendekatan audit, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, memperoleh pemahaman tentang proses dan strategi bisnis klien serta menilai risiko. Pemahaman atas strategi bisnis dan proses klien sangat penting agar dapat menilai risiko *misstatement* dalam laporan keuangan secara memadai dan menafsirkan informasi yang diperoleh selama audit. Kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal efektif yang dimiliki klien dapat mengurangi *risiko misstatements* dalam laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal. Apabila klien dinilai memiliki pengendalian internal yang efektif, jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan dapat dikurangi secara signifikan.

2) Melakukan uji kendali dan uji substantif atas transaksi

Tujuan utama dari tahap kedua ini adalah untuk memperoleh bukti atas pengendalian spesifik yang mendukung penilaian risiko pengendalian dan pelaksanaan audit atas pengendalian internal pada pelaporan keuangan klien, serta memperoleh bukti atas ketepatan nilai moneter suatu transaksi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka dilakukan uji kendali dan uji

substantif. Uji kendali merupakan pengujian atas efektivitas pengendalian untuk menyesuaikan pengurangan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan semula. Uji substantif merupakan pengujian atas pencatatan transaksi dengan melakukan verifikasi atas nilai moneter transaksi tersebut.

3) Melakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo

Tujuan utama dari tahap ketiga ini adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Prosedur analitis merupakan evaluasi menggunakan perbandingan-perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun-akun dan data-data lainnya disajikan secara wajar. Uji rincian saldo merupakan prosedur audit yang bertujuan menguji apakah terdapat *misstatement* pada nilai-nilai moneter akun-akun dalam laporan keuangan.

4) Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit

Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur pada setiap tujuan audit dan pada setiap akun dalam laporan keuangan pada tiga tahap sebelumnya, maka tahap terakhir yang harus dilakukan auditor adalah mengumpulkan seluruh informasi yang telah diperoleh untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam tahap ini auditor juga harus melakukan *review* atas kewajiban kontijensi dan *subsequent event*. Setelah proses audit selesai, akuntan publik harus menerbitkan sebuah laporan audit atas laporan keuangan klien dan kemudian mengkomunikasikan laporan audit kepada para pemilik kepentingan.

2.2 Regulasi Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Audit di Indonesia

Dalam rangka memenuhi prinsip transparansi serta melindungi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan wajib

menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berkala. Namun untuk meningkatkan kualitas (keandalan dan relevansi) informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Peraturan tersebut antara lain UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Dalam Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan (perusahaan) kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a) kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d) Perseroan merupakan Persero;
- e) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); atau
- f) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui direksi. Apabila kewajiban audit atas laporan keuangan perusahaan oleh akuntan publik tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tersebut tidak dapat disahkan oleh RUPS. Setelah memperoleh pengesahan dari RUPS, laporan keuangan tersebut baru dapat dipublikasikan melalui surat kabar.

Dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala disebutkan bahwa setiap emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Laporan

keuangan tahunan tersebut harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan juga wajib diumumkan kepada publik dengan memuat opini dari akuntan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit lag* telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai negara. Masing-masing peneliti menguji berbagai faktor atribut perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi lamanya *audit lag* sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut, baik yang dilakukan di luar negeri maupun di Indonesia, tergambar dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Ashton, Willingham, dan Elliott (1987) melakukan penelitian mengenai *audit lag* di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dikirimkan kepada para *engagement partner* dari *U.S. offices of Peat, Marwick, Mitchell & Co.*, yang meminta informasi terkait audit terhadap klien yang telah selesai dilaksanakan. Total sampel yang digunakan berjumlah 488 perusahaan dari 6 kelompok industri pada tahun 1982. Penelitian tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor total pendapatan, jenis industri keuangan/nonkeuangan, status publik/nonpublik perusahaan, bulan akhir periode laporan keuangan, kualitas sistem kendali internal, kompleksitas operasi, kompleksitas sistem akuntansi dan keuangan, kompleksitas sistem olah data elektronik, kompleksitas pelaporan, bauran relatif kerja audit yang dilaksanakan pada periode interim dan tanggal berakhirnya laporan keuangan, lamanya perusahaan menjadi klien *U.S. offices of Peat, Marwick, Mitchell & Co.*, rugi/laba perusahaan, persentase rugi/laba perusahaan terhadap *total assets*, dan jenis opini audit. Hubungan tersebut diuji dengan menggunakan *univariate analysis* dan *multivariate analysis*. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lamanya *audit lag* pada seluruh perusahaan sampel adalah 62,5 hari. Perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan memiliki lama rata-rata *audit lag* selama 56,7 hari, sedangkan perusahaan-perusahaan dalam industri nonkeuangan memiliki

lama rata-rata *audit lag* selama 68 hari. Perusahaan publik memiliki lama rata-rata *audit lag* selama 48,8 hari, sedangkan perusahaan nonpublik memiliki lama rata-rata *audit lag* selama 66,4 hari. *Univariate analysis* menghasilkan kesimpulan bahwa *audit lag* cenderung lebih lama pada perusahaan yang (1) berada dalam jenis industri nonkeuangan, (2) menerima opini *qualified*, (3) tidak diperdagangkan di publik, (4) memiliki kendali internal yang lemah, (5) memiliki akhir periode akuntansi selain bulan Desember, (6) kurang menerapkan teknologi olah data yang kompleks, dan (7) memiliki bauran relatif pelaksanaan kerja audit yang lebih banyak setelah akhir periode. Sementara *multivariate analysis* menghasilkan kesimpulan bahwa *audit lag* memiliki hubungan positif dengan total pendapatan dan kompleksitas operasi, dan memiliki hubungan negatif dengan jenis perusahaan publik, kualitas kendali internal, dan bauran relatif pelaksanaan kerja audit sebelum akhir periode akuntansi.

Carslaw dan Kaplan (1991) melakukan penelitian mengenai *audit lag* terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *New Zealand Stock Exchange*, Selandia Baru. Sampel yang digunakan dalam penelitian meliputi 245 perusahaan pada tahun 1987 dan 206 perusahaan pada tahun 1988. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report* perusahaan. Penelitian tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor ukuran perusahaan, jenis industri keuangan/ nonkeuangan, rugi/laba perusahaan, *extraordinary item*, jenis opini audit, ukuran kantor akuntan publik, akhir periode laporan keuangan, kepemilikan perusahaan, dan proporsi *debt-to-total assets*. Hubungan tersebut diuji dengan model regresi berganda. Hasil analisis regresi terhadap perusahaan sampel tahun 1987 menghasilkan kesimpulan bahwa *audit lag* cenderung lebih lama pada perusahaan yang mengalami kerugian, perusahaan yang memiliki *extraordinary item*, perusahaan yang memperoleh opini audit selain *unqualified opinion*, perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil, dan perusahaan yang dikendalikan oleh manajer. Sementara hasil analisis regresi terhadap perusahaan sampel pada tahun 1988 menghasilkan kesimpulan bahwa *audit lag* cenderung lebih lama pada perusahaan yang mengalami kerugian, perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil, perusahaan dalam industri nonkeuangan, dan perusahaan dengan proporsi *debt-to-total assets* yang besar.

Dari perbandingan hasil penelitian pada tahun 1987 dan tahun 1988, dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 2 variabel yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap *audit lag* secara konsisten dalam dua hasil penelitian tersebut, yaitu variabel ukuran perusahaan dan rugi/laba perusahaan. Sementara terdapat 4 variabel yang memiliki hubungan yang signifikan pada suatu periode namun tidak memiliki hubungan yang signifikan pada periode lainnya terhadap lamanya *audit lag*, yaitu variabel *extraordinary item*, jenis opini audit, jenis industri keuangan/nonkeuangan, dan proporsi *debt-to-total assets*.

Hossain dan Taylor (1998) melakukan penelitian mengenai *audit lag* terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Karachi Stock Exchange*, Pakistan pada tahun 1993. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 103 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report* perusahaan. Penelitian tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor ukuran perusahaan, rasio *debt-to-equity*, profitabilitas, anak perusahaan dari perusahaan multinasional, jenis industri keuangan/nonkeuangan, *audit fee*, dan ukuran kantor akuntan publik. Untuk menguji hipotesis, penelitian tersebut menggunakan model *multiple linear regression*. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lamanya *audit lag* pada perusahaan-perusahaan sampel adalah 143,3 hari dengan jangka waktu minimum 30 hari hingga jangka waktu maksimum 249 hari. Hal ini berarti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Karachi Stock Exchange* membutuhkan waktu rata-rata lima bulan setelah tanggal laporan keuangan berakhir untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya. Sementara hasil model regresi penelitian menunjukkan bahwa *audit lag* memiliki hubungan negatif dengan koneksi multinasional (anak perusahaan dari perusahaan multinasional) sedangkan faktor-faktor lain tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *audit lag*.

Ahmad dan Kamarudin (2003) melakukan penelitian mengenai *audit lag* terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Kuala Lumpur Stock Exchange*, Malaysia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 perusahaan yang meliputi laporan keuangan perusahaan selama periode tahun 1996-2000. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari *annual report* perusahaan. Penelitian tersebut menguji

hubungan antara *audit lag* dengan faktor ukuran perusahaan, rugi/laba perusahaan, jenis opini audit, auditor, *extraordinary item*, jenis industri keuangan/nonkeuangan, akhir periode laporan keuangan perusahaan, dan proporsi *debt-to-total assets*. Hubungan tersebut diuji dengan menggunakan model regresi. Hasil analisis regresi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa lamanya *audit lag* memiliki hubungan positif dengan (1) perusahaan pada industri nonkeuangan, (2) perusahaan yang menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian, (3) perusahaan yang memiliki akhir periode pelaporan keuangan selain 31 Desember, (4) perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan non *big five*, (5) perusahaan yang menghasilkan *earnings* negatif, dan (6) memiliki risiko yang lebih tinggi.

Sementara di Spanyol, Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2005) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Madrid Stock Exchange*, Spanyol. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 105 perusahaan. Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan menerapkan kriteria semua perusahaan yang memiliki akhir periode laporan keuangan per 31 Desember. Analisis dalam penelitian ini meliputi 4 periode akuntansi perusahaan, yaitu tahun 2002 hingga tahun 2005. Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan *website Madrid Stock Exchange*. Penelitian tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor kelompok perusahaan yang menjadi subjek *regulatory pressures*, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, opini audit, dan perubahan regulasi. Hubungan tersebut diuji melalui analisis regresi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lamanya *audit lag* dari seluruh sampel adalah 81,5 hari. Lama rata-rata *audit lag* terendah pada tahun 2002 terdapat pada perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan, tahun 2003 terdapat pada industri energi, dan tahun 2004 dan 2005 terdapat pada industri komunikasi. Sementara dari hasil model regresi penelitian menunjukkan bahwa *audit lag* memiliki hubungan negatif dengan ukuran perusahaan, dan kelompok perusahaan yang menjadi subjek *regulatory pressures*.

Almosa dan Alabbas (2007) melakukan penelitian mengenai *audit lag* terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Saudi Stok Market*, Arab Saudi selama periode tahun 2003-2006. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi 8 kelompok, yaitu bank komersial, manufaktur, semen, jasa, elektronik, telekomunikasi, asuransi, dan pertanian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report* perusahaan, termasuk laporan keuangan auditan dan laporan auditor. Penelitian tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri keuangan/nonkeuangan, ukuran kantor akuntan publik, dan jenis opini audit. Pegujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linear. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lamanya *audit lag* untuk seluruh sampel adalah 46,45 hari. Dari seluruh sampel tersebut, perusahaan dalam industri keuangan memiliki lama rata-rata *audit lag* terendah, yaitu selama 23,12 hari, sedangkan perusahaan dalam industri jasa memiliki lama rata-rata *audit lag* tertinggi, yaitu selama 55,66 hari. Sementara hasil pengujian melalui model regresi menghasilkan kesimpulan bahwa lamanya *audit lag* memiliki korelasi positif dengan perusahaan yang berukuran besar dan memiliki korelasi negatif pada perusahaan finansial dan perusahaan yang menghasilkan laba.

Al-Ajmi (2008) melakukan penelitian mengenai *audit lag* terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Bahrain Stock Exchange* selama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2006. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari surat kabar lokal, website *Bahrain Stock Exchange*, dan berbagai sumber panduan investor. Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria (1) perusahaan yang mempublikasikan *annual report* di salah satu surat kabar atau melaporkannya kepada *Bahrain Stock Exchange*, (2) *annual report* perusahaan tersedia dan berisi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, (3) perusahaan yang terdaftar di *Bahrain Stock Exchange*, (4) perusahaan memiliki akhir periode pelaporan keuangan per 31 Desember, (5) data kepemilikan perusahaan tersedia di *Bahrain Stock Exchange*, dan (6) perusahaan setidaknya mempublikasikan dua *annual report*. Terdapat dua kelompok perusahaan yang terdaftar di *Bahrain Stock Exchange* yang dikecualikan dari sampel. Kelompok pertama adalah perusahaan asing (bukan perusahaan Bahrain) karena kelompok perusahaan ini menerapkan persyaratan pelaporan di negara asalnya yang berbeda dengan persyaratan

pelaporan bagi perusahaan-perusahaan di Bahrain. Kelompok kedua adalah perusahaan tertutup dimana kelompok perusahaan ini dibebaskan dari persyaratan pelaporan di Bahrain karena susunan pemegang saham dan saham-sahamnya tidak ditawarkan kepada publik pada umumnya. Penelitian ini menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor ukuran kantor auditor, struktur modal, ukuran perusahaan, berita baik/buruk bagi investor, *corporate governance*, kompleksitas akuntansi, jenis industri, dan peraturan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linear. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lamanya *audit lag* pada seluruh sampel adalah 48 hari dengan lama minimum 7 hari dan lama maksimum 154 hari. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *audit lag* cenderung lebih pendek pada perusahaan besar dan perusahaan dalam industri perbankan. Selain, itu perusahaan yang melaporkan berita baik bagi investor, seperti melaporkan laba yang lebih tinggi atau meningkatkan dividen, juga cenderung memiliki *audit lag* yang lebih pendek. Sementara, perusahaan yang memiliki *leverage (debt-to-total assets)* yang tinggi cenderung memiliki *audit lag* yang lebih lama.

Di Indonesia, Ratnawaty dan Sugiharto (2005) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan dalam industri *real estate* dan properti yang terdaftar di BEI. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan auditan tahun 2000, 2001, dan 2002 serta arsip-arsip dalam *Indonesian Capital Market Directory* tahun 2000, 2001, dan 2002. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan dalam industri *real estate* dan properti yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2000, 2001, dan 2002. Penelitian tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan ukuran perusahaan, rasio *total assets turnover*, rasio *debt-to-equity*, laba/rugi usaha, ukuran kantor akuntan publik, dan opini audit. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil pengujian terhadap sampel pada tahun 2000 menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi lamanya *audit lag*. Sementara pada hasil pengujian secara parsial, perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian cenderung memiliki *audit lag* yang lebih pendek. Hasil pengujian terhadap sampel pada tahun 2001 menunjukkan bahwa model regresi

signifikan dan dapat digunakan untuk memprediksi lamanya *audit lag*, sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *total assets turnover* yang besar dan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar cenderung memiliki *audit lag* yang lebih pendek. Hasil pengujian terhadap sampel pada tahun 2002 menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi lamanya *audit lag*. Sementara pada hasil pengujian secara parsial, perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar cenderung memiliki *audit lag* yang lebih pendek.

Prabandari dan Rustiana (2007) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria perusahaan tidak melakukan *Initial Public Offering* (IPO) selama kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2004, dan perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2004 secara berturut-turut. Penelitian tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor ukuran perusahaan, rasio *debt-to-total assets*, laba/rugi perusahaan, jenis opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *one-way ANOVA* dan *independent t-test*. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa lama rata-rata *audit lag* pada perusahaan sampel adalah 71,62 hari. Hasil pengujian hipotesis penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa *audit lag* cenderung lebih cepat pada perusahaan yang berukuran besar. Selain itu, perusahaan yang mengumumkan rugi cenderung memiliki *audit lag* yang lebih lama.

Selain itu, Rachmawati (2008) juga melakukan penelitian mengenai *audit lag* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2003 sampai tahun 2005. Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria (1) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk tahun 2003 sampai tahun 2005, (2) perusahaan yang memiliki struktur organisasi untuk menunjukkan divisi auditor internal, dan (3) perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di BEI. Penelitian

tersebut menguji hubungan antara *audit lag* dengan faktor profitabilitas, solvabilitas, adanya auditor internal perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda melalui *t-test* dan *F-test* dengan tingkat α 5%. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa lama rata-rata *audit lag* pada perusahaan sampel adalah 76,6 hari. Sementara hasil pengujian melalui regresi menunjukkan bahwa *audit lag* dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian-penelitian Terdahulu di Luar Negeri

| Peneliti | Tahun | Sampel | Variabel Independen | Kesimpulan |
|--------------------|--------------|--|---|---|
| Carslaw dan Kaplan | 1991 | Selandia Baru (seluruh perusahaan publik yang <i>listed</i> ; tahun 1987 dan 1988) | ukuran perusahaan, jenis industri keuangan/nonkeuangan, rugi/laba perusahaan, <i>extraordinary item</i> , jenis opini audit, ukuran kantor akuntan publik, akhir periode laporan keuangan, kepemilikan perusahaan, dan proporsi <i>debt-to-total assets</i> . | <i>Audit lag</i> berhubungan positif dengan perusahaan yang mengalami kerugian dan berhubungan negatif dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar. |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| | | | | |
|--|-------------|---|---|---|
| <p>Ashton, Willingham, dan Elliott</p> | <p>1987</p> | <p>Amerika Serikat (488 perusahaan; tahun 1982)</p> | <p>total pendapatan, jenis industri keuangan/ nonkeuangan, status publik/nonpublik perusahaan, bulan akhir periode laporan keuangan, kualitas sistem kendali internal, kompleksitas operasi, kompleksitas sistem akuntansi dan keuangan, kompleksitas sistem olah data elektronik, kompleksitas pelaporan, bauran relatif kerja audit, lamanya perusahaan menjadi klien, rugi/laba perusahaan, persentase rugi/laba perusahaan terhadap total aset, dan jenis opini audit</p> | <p><i>Audit lag</i> memiliki hubungan positif dengan perusahaan yang (1) berada dalam jenis industri nonkeuangan, (2) menerima opini <i>qualified</i>, (3) tidak diperdagangkan di publik, (4) memiliki kendali internal yang lemah, (5) memiliki akhir periode akuntansi selain bulan Desember, (6) kurang menerapkan teknologi olah data yang kompleks, dan (7) memiliki bauran relatif pelaksanaan kerja audit yang lebih banyak setelah akhir periode laporan keuangan.</p> |
|--|-------------|---|---|---|

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| | | | | |
|--|-------------|---|---|--|
| <p>Hossain dan Taylor</p> | <p>1998</p> | <p>Pakistan (103 perusahaan yang <i>listed</i>; 1993)</p> | <p>ukuran perusahaan, rasio <i>debt-to-equity</i>, profitabilitas, anak perusahaan dari perusahaan multinasional, jenis industri keuangan/non keuangan, <i>audit fee</i>, dan ukuran kantor akuntan publik.</p> | <p><i>Audit lag</i> memiliki hubungan negatif dengan koneksi multinasional (anak perusahaan dari perusahaan multinasional)</p> |
| <p>Ponte, Rodriguez, dan Dominguez</p> | <p>2005</p> | <p>Spanyol (105 perusahaan yang <i>listed</i>; tahun 2002-2005)</p> | <p>Kelompok perusahaan yang menjadi subjek <i>regulatory pressures</i>, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, opini audit, perubahan regulasi.</p> | <p><i>Audit lag</i> memiliki hubungan negatif dengan ukuran perusahaan, dan kelompok perusahaan yang menjadi subjek <i>regulatory pressures</i>.</p> |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---|--|
| <p>Ahmad dan Kamarudin</p> | <p>2003</p> | <p>Malaysia (100 perusahaan yang <i>listed</i>; tahun 1996-2000)</p> | <p>ukuran perusahaan, rugi/laba perusahaan, jenis opini audit, auditor, <i>extraordinary item</i>, jenis industri keuangan/non keuangan, akhir periode laporan keuangan perusahaan, dan proporsi <i>debt-to-total assets</i>.</p> | <p><i>Audit lag</i> memiliki hubungan positif dengan (1) perusahaan pada industri nonkeuangan, (2) perusahaan yang menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian, (3) perusahaan yang memiliki akhir periode pelaporan keuangan selain 31 Desember, (4) perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan <i>non big five</i>, (5) perusahaan yang menghasilkan <i>earnings</i> negatif, dan (6) memiliki risiko yang lebih tinggi.</p> |
|----------------------------|-------------|--|---|--|

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| | | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|--|
| <p>Almosa dan Alabbas</p> | <p>2007</p> | <p>Arab Saudi (seluruh perusahaan yang <i>listed</i>; tahun 2003-2006)</p> | <p>ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri keuangan/nonkeuangan, ukuran kantor akuntan publik, dan jenis opini audit.</p> | <p><i>Audit lag</i> memiliki korelasi positif dengan perusahaan yang berukuran besar dan memiliki korelasi negatif pada perusahaan finansial dan perusahaan yang menghasilkan laba.</p> |
| <p>Al-Ajmi</p> | <p>2008</p> | <p>Bahrain (seluruh perusahaan yang <i>listed</i>; tahun 1992-2006)</p> | <p>ukuran kantor auditor, struktur modal, ukuran perusahaan, berita baik/buruk bagi investor, <i>corporate governance</i>, kompleksitas akuntansi, jenis industri, dan peraturan.</p> | <p><i>Audit lag</i> cenderung lebih pendek pada perusahaan besar, perusahaan dalam industri perbankan, dan perusahaan yang melaporkan berita baik bagi investor (melaporkan laba yang lebih tinggi dan meningkatkan dividen)</p> |

Tabel 2.2

Daftar Penelitian-penelitian Terdahulu di Indoensia

| Peneliti | Tahun | Sampel | Variabel Independen | Kesimpulan |
|-------------------------|-------|---|--|---|
| Ratnawaty dan Sugiharto | 2005 | 33 perusahaan dalam industri real estate dan properti yang <i>listed</i> ; tahun 2000-2002. | ukuran perusahaan, rasio <i>total assets turnover</i> , rasio <i>debt-to-equity</i> , laba/rugi usaha, ukuran kantor akuntan publik, dan opini audit | <p>Hasil pengujian sampel tahun 2000: perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian memiliki <i>audit lag</i> yang lebih pendek.</p> <p>Hasil pengujian sampel tahun 2001: perusahaan yang memiliki rasio <i>total assets turnover</i> yang besar dan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar memiliki <i>audit lag</i> yang lebih pendek.</p> <p>Hasil pengujian sampel tahun 2002: perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar memiliki <i>audit lag</i> yang lebih pendek.</p> |

Tabel 2.2 (Lanjutan)

| | | | | |
|-------------------------|------|--|--|---|
| Prabandari dan Rustiana | 2007 | Seluruh perusahaan dalam industri keuangan yang <i>listed</i> ; tahun 2002-2004 | ukuran perusahaan, rasio <i>debt-to-total assets</i> , laba/rugi perusahaan, jenis opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik | <i>Audit lag</i> cenderung lebih pendek pada perusahaan besar dan perusahaan yang mengumumkan laba. |
| Rachmawati | 2008 | Seluruh perusahaan dalam industri manufaktur yang <i>listed</i> ; tahun 2003-2005. | faktor profitabilitas, Solvabilitas, adanya auditor internal perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik. | <i>Audit lag</i> dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik. |

2.4 Pengaruh Faktor Atribut Perusahaan terhadap *Audit lag*

2.4.1 Ukuran Perusahaan

Faktor ukuran perusahaan merupakan faktor yang paling sering diteliti pengaruhnya terhadap *audit lag* dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, terdapat beberapa argumen yang melandasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap lamanya *audit lag*. Carslaw dan Kaplan (1991) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sistem kontrol internal yang lebih solid yang dapat mengurangi kecenderungan terjadinya *error* dalam laporan keuangan sehingga memungkinkan auditor untuk mengandalkan sistem kontrol internal perusahaan lebih ekstensif dan

melaksanakan lebih banyak kerja interim. Abdulla (1996) berargumen bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya untuk membayar *audit fees* relatif lebih tinggi kepada auditor untuk menyelesaikan audit lebih cepat setelah tanggal laporan keuangan berakhir (Hossain dan Taylor, 1998). Dyer dan McHugh (1975) menyatakan bahwa perusahaan besar berupaya untuk mengurangi lamanya *audit lag* karena perusahaan besar cenderung lebih ketat diawasi oleh publik. Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2005) berpendapat bahwa perusahaan besar melakukan kendali dan pengamatan lebih besar terhadap auditornya sehingga auditor merasakan tekanan lebih besar untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat. Selain itu perusahaan yang relatif lebih besar juga memiliki peran kepemimpinan di antara perusahaan-perusahaan dalam sektor yang sama sehingga mendorong perusahaan besar untuk berperilaku berbeda yang akan diikuti pula oleh perusahaan lainnya, salah satunya adalah pengurangan *audit lag*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap lamanya *audit lag*. Penelitian yang dilakukan oleh Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2005) menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap lamanya *audit lag*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991) dan Al-Ajmi (2008) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap lamanya *audit lag*. Sebaliknya, Almosa dan Alabbas (2007) justru menemukan hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap lamanya *audit lag*. Hasil *multivariate analysis* dalam penelitian yang dilakukan oleh Ashton, Willingham, dan Elliott (1987) juga menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap lamanya *audit lag*.

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Prabandari dan Rustiana (2007) menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki *audit lag* yang pendek. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) menghasilkan kesimpulan bahwa *audit lag* dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Taylor (1998), Ahmad dan Kamarudin (2003), dan Ratnawaty dan Sugiharto (2005) tidak

berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara lamanya *audit lag* dengan ukuran perusahaan sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian mereka.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap lamanya *audit lag* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lamanya *audit lag*

2.4.2 Opini Audit

Opini audit merupakan gambaran kewajaran penyajian laporan keuangan oleh perusahaan. Oleh karena itu, opini audit yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan turut berperan dalam membentuk citra manajemen perusahaan di mata para *stakeholder*. Dalam kaitannya dengan lamanya *audit lag*, Whittred (1980) menjelaskan bahwa laporan keuangan dengan *qualified opinion* akan menjadi berita “buruk” bagi para pemegang saham. Hal tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap kinerja manajemen perusahaan oleh pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung enggan menerima *qualified opinion* dan auditor pun juga cenderung enggan memberi *qualified opinion*. Dalam kondisi yang demikian, terdapat potensi peningkatan lamanya *audit lag* disebabkan adanya pengembangan prosedur audit oleh auditor. Pengembangan prosedur audit oleh auditor tersebut bertujuan untuk mengeliminasi adanya ketidakpastian dalam hasil audit. Selain itu, manajemen perusahaan juga meningkatkan proses negosiasi dengan auditor terkait temuan audit tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashton, Willingham, dan Elliott (1987) menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan yang menerima opini *qualified* cenderung memiliki *audit lag* yang lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian. Hasil penelitian Ratnawaty dan Sugiharto (2005) terhadap sampel perusahaan tahun 2000 menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian cenderung memiliki *audit lag* yang lebih pendek. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh

Carslaw dan Kaplan (1991) dan Ahmad dan Kamarudin (2003) juga menunjukkan bahwa *audit lag* cenderung lebih lama pada perusahaan yang menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2005); Prabandari dan Rustiana (2007); dan Almosa dan Alabbas (2007) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara jenis opini audit terhadap lamanya *audit lag* sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian mereka.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh opini audit terhadap lamanya *audit lag* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha2 : Perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian memiliki *audit lag* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini selain wajar tanpa pengecualian

2.4.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Saat ini, terdapat empat KAP terbesar di dunia yang telah memiliki kantor di berbagai negara di dunia ataupun berafiliasi dengan KAP lokal di negara tersebut. Empat KAP terbesar di dunia tersebut mendapat julukan *The Big Four*. *The Big Four* antara lain Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan PricewaterhouseCooper (PwC). Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*, antara lain:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young;
2. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu;
3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja berafiliasi dengan KPMG; dan
4. KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan PwC.

Terkait pengaruh ukuran suatu KAP terhadap lamanya *audit lag*, Hossain dan Taylor (1998) menyatakan bahwa KAP yang besar (berafiliasi dengan KAP internasional) memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyelesaikan kerja audit lebih cepat untuk mempertahankan reputasi mereka. Jika tidak, KAP tersebut

tidak akan memperoleh penugasan sebagai auditor independen lagi oleh klien di tahun selanjutnya. Selain itu, KAP yang besar dan terkenal memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak daripada KAP yang lebih kecil sehingga KAP besar cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat daripada KAP yang lebih kecil. Ahmad dan Kamarudin (2003) menjelaskan bahwa KAP yang besar lebih mampu melaksanakan audit secara lebih efisien dan lebih efektif daripada KAP yang lebih kecil serta memiliki fleksibilitas dalam menjadwalkan pelaksanaan audit sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. Williams dan Dirsmith (1988) berargumen bahwa KAP internasional cenderung lebih efisien dalam pelaksanaan audit karena mereka dapat memanfaatkan teknologi audit secara superior (Ponte, Rodriguez, dan Dominguez, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003) menunjukkan bahwa lamanya *audit lag* cenderung lebih pendek pada perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik besar yang diasosiasikan dengan kantor akuntan publik yang termasuk dalam kategori *big five*. Hasil penelitian Ratnawaty dan Sugiharto (2005) terhadap sampel perusahaan tahun 2001 dan tahun 2002 menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar cenderung memiliki *audit lag* yang lebih pendek. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) juga menghasilkan kesimpulan bahwa lamanya *audit lag* memiliki pengaruh yang signifikan dengan ukuran kantor akuntan publik.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991); Hossain dan Taylor (1998); Ponte, Rodriguez, dan Dominguez (2005); Almosa dan Alabbas (2007); Al-Ajmi (2008), dan Prabandari dan Rustiana (2007) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran kantor akuntan publik terhadap lamanya *audit lag* sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian mereka.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai ukuran kantor akuntan publik dan pengaruhnya terhadap lamanya *audit lag* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha3 : Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki *audit lag* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *Big Four*

2.4.4 Jenis Industri Keuangan/Nonkeuangan

Ahmad dan Kamarudin (2003) dan Almosa dan Alabbas (2007) mengemukakan argumen bahwa perusahaan dalam industri keuangan cenderung memiliki sedikit atau tidak sama sekali *inventory*. Proporsi *inventory* yang relatif lebih rendah dibandingkan jenis aset lainnya menyebabkan *audit lag* pada perusahaan dalam industri keuangan lebih singkat. Hal ini karena auditor dapat mengabaikan atau menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melaksanakan audit terhadap *inventory* dimana *material errors* seringkali ditemukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashton, Willingham, dan Elliott (1987) melalui *univariate analysis* menghasilkan kesimpulan bahwa *audit lag* cenderung lebih lama pada perusahaan yang berada dalam industri keuangan. Hasil penelitian Al-Ajmi (2008) menunjukkan bahwa *audit lag* cenderung lebih pendek pada perusahaan dalam industri perbankan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991), Ahmad dan Kamarudin (2003), dan Almosa dan Alabbas (2007) juga menghasilkan kesimpulan bahwa lamanya *audit lag* cenderung lebih pendek pada perusahaan yang berada dalam industri keuangan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Taylor (1998) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara jenis industri keuangan terhadap lamanya *audit lag* sebagaimana dihipotesiskan dalam penelitian mereka.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai jenis industri dan pengaruhnya terhadap lamanya *audit lag* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha4 : Perusahaan yang berada dalam industri keuangan memiliki *audit lag* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang berada dalam industri nonkeuangan